



2023

PROFIL KEMISKINAN

Kota Depok

Volume 3, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK**

<https://depokkota.bps.go.id>

PROFIL KEMISKINAN Kota Depok Volume 3, 2023

2023

PROFIL KEMISKINAN KOTA DEPOK, 2023

Volume 3, 2023

Katalog : 3205005.3276

No. Publikasi : 32760.2328

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : viii + 38 halaman

Penyusun Naskah: Badan Pusat Statistik Kota Depok

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kota Depok

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kota Depok

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Kota Depok

TIM PENYUSUN
PROFIL KEMISKINAN KOTA DEPOK, 2023
Volume 3, 2023

Pengarah

Agus Marzuki Prihantoro, S.Si, M.Kesos

Penanggung jawab :

Agus Marzuki Prihantoro, S.Si, M.Kesos

Editor :

Ir. Hilmiah

Pengolah Data :

Faisal Haris, S.Tr.Stat

Penulis :

Anis Dyah Rahmawati, SST

Desain Layout :

Dimas Sulistio, AMd

Nadila Aurelia

Infografis :

Faisal Haris, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan isu global, nasional, dan lokal yang selalu menjadi perhatian banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan, diperlukan penyediaan data kemiskinan yang akurat. BPS berupaya menyajikan data terkait kemiskinan salah satunya melalui publikasi Profil Kemiskinan Kota Depok 2023.

Publikasi Profil Kemiskinan Kota Depok 2023 menyajikan data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator lain yang terkait dengan isu kemiskinan Kota Depok. Data dan informasi yang tersaji pada publikasi ini merupakan hasil penghitungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret 2023. Publikasi tahunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan strategi pengentasan kemiskinan.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Depok, Desember 2023
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK



Agus Marzuki Prihantoro, S.Si, M.Kesos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	4
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II METODOLOGI.....	7
2.1 Metode Penghitungan Kemiskinan.....	7
2.2 Indikator Kemiskinan.....	14
BAB III KEMISKINAN KOTA DEPOK.....	19
3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Depok.....	19
3.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2015-2023.....	22
3.3 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota Depok.....	27

BAB IV PROFIL KEMISKINAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK...	30
4.1 Pendidikan.....	30
4.2 Ketenagakerjaan.....	31
4.3 Pengeluaran Perkapita.....	32
4.4 Fasilitas Perumahan.....	34
4.5 Program Pemerintah.....	35
4.6 Umur	36
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Persentase Penduduk Miskin (P_0) 10 Terendah Kabupaten/Kota Se Indonesia tahun 2023.....	19
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023.....	29
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Status Bekerja, 2023.....	30
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Sektor Bekerja, 2023.....	31
Tabel 4.4	Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan menurut Wilayah dan Status Miskin, 2023.....	32
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Wilayah yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama, 2023.....	33
Tabel 4.6	Rata-rata Jumlah Sembako yang Diterima dan Harga yang Dibayarkan dalam BPNT/Program Sembako, 2023.....	34
Tabel 4.7	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kelompok Umur, 2023	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, 2023.....	18
Gambar 3.2	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok, 2004-2023.....	20
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Miskin di Kota Depok, 2015-2023.....	22
Gambar 3.4	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Depok, 2015-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan).....	24
Gambar 3.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Depok, 2004-2023.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian seluruh negara di dunia. “*End poverty in all its forms everywhere*” yang berarti mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, menjadi semangat bagi semua bangsa. Pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama diantara 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bagi Indonesia, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan merupakan salah satu agenda utama pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pelaksanaan agenda tersebut membutuhkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan (swasta).

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengurangi kemiskinan adalah dengan penanggulangan kemiskinan

ekstrem. Kemiskinan ekstrem merupakan sebagian kecil dari penduduk miskin. Ketika terjadi penghapusan kemiskinan ekstrem diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam Inpres No. 4 Tahun 2022 tersebut diinstruksi untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Sebagai salah satu aspek penting dalam penanggulangan kemiskinan, ketersediaan data kemiskinan yang akurat menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada

kondisi hidup orang miskin. Menurut Haughton & Khandker (2009), ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu:

1. Merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuat kebijakan pada kehidupan orang miskin.
2. Mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat.
3. Memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin.
4. Mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin.

Data kemiskinan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi

mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada 1993 informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan publikasi ini antara lain untuk:

- a. Mengetahui perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Depok;
- b. Mengetahui profil kemiskinan Kota Depok berdasarkan karakteristiknya tahun 2023.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan secara regional di Kota Depok tahun 2023. Karakteristik penduduk miskin dan tidak miskin, distribusi dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin dan beberapa indikator kemiskinan lainnya juga disajikan dengan menggunakan data Susenas Modul Konsumsi dan Kor pada Maret 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang metodologi penghitungan kemiskinan.

Bab III menjelaskan tentang kemiskinan di Kota Depok, perkembangan tingkat kemiskinan, perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Bab IV menjelaskan tentang Profil Kemiskinan di Kota Depok berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan pada rumah tangga miskin di Kota Depok.

BAB II

METODOLOGI

2.1. METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN

a. Konsep

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pada pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di Kota Depok tahun 2023 adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2023.

c. Metodologi

Penduduk Miskin

Konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang digunakan BPS mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank*. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk

dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) adalah pengeluaran minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai rupiah pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

d. Teknik Penghitungan Garis dan Indikator Kemiskinan

Pada level kabupaten/kota, penghitungan kemiskinan tidak menggunakan GKM dan GKNM seperti yang dilakukan

pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Metode ini tidak dapat digunakan karena:

- Jumlah sampel yang cukup terbatas dalam populasi referensi di level kabupaten/kota.
- Estimasi tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan di tingkat kabupaten/kota.

Pendekatan yang kemudian digunakan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/ Kota dengan cara:

$$GKS_{ij}^t = GKS_{ij}^{t-1} x [1 + (E_j \times I_{ij})]$$

dimana GKS_{ij}^t adalah Garis Kemiskinan Sementara kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j di tahun t dan GKS_{ij}^{t-1} adalah Garis Kemiskinan Sementara kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j di tahun $t-1$ atau tahun sebelumnya.

Catatan:

- Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke- i digunakan elastisitas provinsi ke- j di level perdesaan.
- Untuk mencari GKS pada tingkat kota ke- i digunakan elastisitas provinsi ke- j di level perkotaan.

- Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan *sister city*).
2. Menentukan P_0 sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j dengan cara mengalikan pertumbuhan P_0 provinsi ke-j periode t ke $t-1$ dengan P_0 kabupaten ke-i pada tahun $t-1$.
 3. Menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menarik titik potong antara GKS dan P_0 sementara.
 4. Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi FGT (Foster-Greer-Thorbecke, 1984).

e. Konsep dan Definisi

Pendidikan

Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan pendidikan yang ditamatkan menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya.

Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diantara penduduk miskin berusia sekolah.

Ketenagakerjaan

Bekerja adalah kegiatan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu.

Bekerja di kegiatan informal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.

Bekerja di kegiatan formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

Bekerja di sektor bukan pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya. Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

Pengeluaran Per Kapita Untuk Makanan

Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan dan non makanan).

Fasilitas Perumahan

Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum terlindung yang meliputi leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk jika air minum utamanya menggunakan air kemasan bermerk atau air isi ulang dan sumber air utama air mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

Program Pemerintah Penanggulangan Kemiskinan

Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang diberikan pemerintah dalam skala Nasional dan merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Salah satu Program Sembako yang diberikan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Status Kemiskinan Berdasarkan Umur

Kategori kelompok umur yang digunakan adalah kelompok umur sesuai Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan dan berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Publikasi Statistik Pemuda Indonesia (BPS, 2022) juga mengelompokkan umur pemuda sesuai Undang-Undang tersebut, yaitu 16-30 tahun. Dalam hal ini, 0-15 tahun adalah umur anak-anak dan > 30 tahun adalah umur dewasa.

2.2. INDIKATOR KEMISKINAN

Pendekatan kebutuhan dasar menggunakan tiga indikator kemiskinan yaitu:

- a. *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

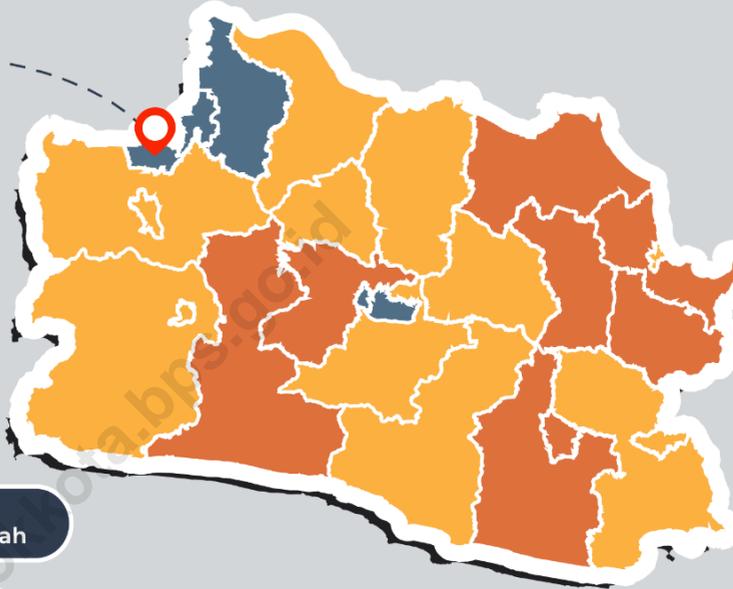
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

<https://depokkota.bps.go.id>

INFOGRAFIS PROFIL KEMISKINAN KOTA DEPOK 2023

KOTA DEPOK

Luas	199.906 km ²
Populasi	2.123.350
Kepadatan Penduduk	10.601
Persentase Miskin (P0)	2,38 %
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.24
Keparahan Kemiskinan (P2)	0.03
Garis Kemiskinan	Rp 804.984
Penduduk Miskin	61,95 Ribu



Ranking Persentase Penduduk Miskin Terendah

1

SE-JAWA BARAT

4

SE-INDONESIA

Persentase Penduduk Miskin

<5%

5%-10%

10%-15%

Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan



Persentase Penduduk Miskin Menurut Status Bekerja



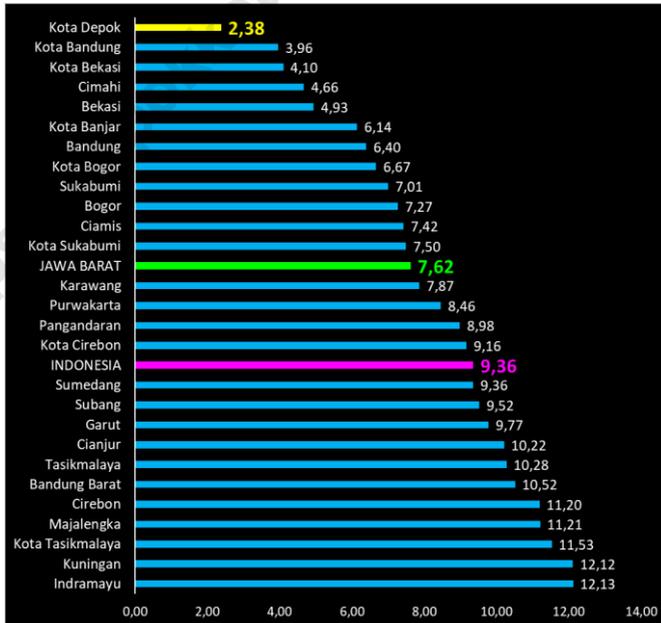
BAB III

KEMISKINAN DI KOTA DEPOK

3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Depok

Persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2023 sebesar 2,38 persen menduduki urutan nomor satu terendah se Jawa Barat. Persentase ini berada di atas persentase kemiskinan Jawa Barat sebesar 7,62 persen dan persentase kemiskinan Indonesia sebesar 9,36 persen.

Gambar 3.1. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, 2023



Sumber: BPS, Susenas 2023

Persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin, dari 2,53 persen menjadi 2,38 persen. Persentase ini membuat Kota Depok mendapatkan kenaikan ranking pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kota Depok menduduki ranking ke 5 dari 514 kabupaten/kota se Indonesia, sedangkan pada tahun 2023 Kota Depok berhasil menduduki ranking 4 dari 514 kabupaten/kota se Indonesia.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Miskin (P_0) 10 Terendah Kabupaten/Kota Se Indonesia Tahun 2022-2023

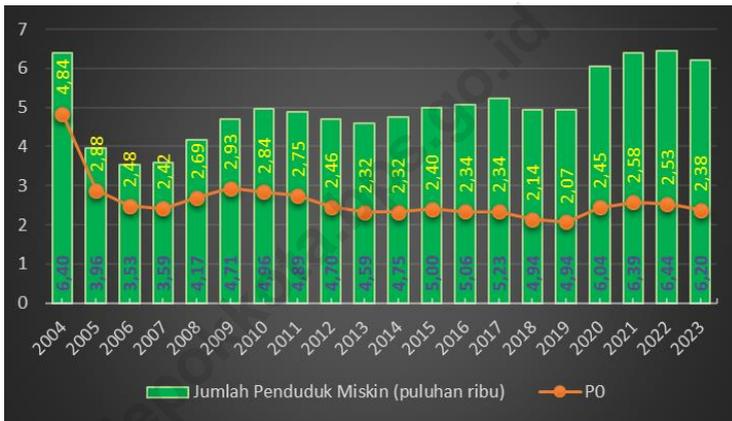
Kabupaten/Kota	P_0	Ranking	Kabupaten/Kota	P_0	Ranking
2022			2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Sawah Lunto	2,28	1	Kota Sawah Lunto	2,27	1
Kota Balikpapan	2,45	2	Badung	2,30	2
Bangka Barat	2,46	3	Kota Balikpapan	2,31	3
Kota Tangerang Selatan	2,50	4	Kota Depok	2,38	4
Kota Depok	2,53	5	Banjar (Kalimantan Selatan)	2,44	5
Badung	2,53	6	Kota Tangerang Selatan	2,57	6
Banjar (Kalimantan Selatan)	2,79	7	Kota Denpasar	2,68	7
Kota Sungai Penuh	2,97	8	Bangka Barat	2,71	8
Kota Denpasar	2,97	9	Kota Sungai Penuh	3,00	9
Kota Solok	3,02	10	Kota Solok	3,05	10

Sumber : BPS, Susenas 2022-2023

Persentase penduduk miskin di Kota Depok periode 2004 sampai 2019 cukup fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan menurun. Sejak tahun 2004, angka

kemiskinan secara konsisten sudah melandai dari 4,84 persen di tahun 2004 menjadi 2,07 persen di tahun 2019.

Gambar 3.2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok, 2004-2023



Sumber: BPS, Susenas 2004 – 2023

Pandemi Covid-19 yang merebak pada tahun 2020 memberikan dampak pada peningkatan kemiskinan di Kota Depok. Pada tahun 2020 yang lalu, persentase penduduk miskin Kota Depok meningkat dikisaran 2,45 persen dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 2,58 persen. Angka ini hampir menyamai angka kemiskinan Kota Depok kondisi 14 tahun lalu yaitu tahun 2007.

Seiring dengan pandemi covid-19 yang mulai mereda dan kehidupan masyarakat berangsur normal, persentase kemiskinan di Kota Depok pun mulai mengalami penurunan kembali. Angka kemiskinan Depok mengalami penurunan menjadi 2,53 persen di tahun 2022 dan semakin menurun pada tahun 2023 sebesar 2,38 persen. Persentase kemiskinan pada tahun 2023 ini semakin mendekati angka persentase sebelum pandemi covid-19 pada tahun 2015-2016. Pada tahun 2023 ini diperkirakan ada sekitar 61,95 ribu penduduk miskin di Kota Depok.

3.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2015-2023

Kota Depok adalah salah satu kota penyangga Ibukota Negara. Kota Depok adalah kota yang digerakkan oleh Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum, Industri Pengolahan, dan Real Estate (Hasil Listing SE2016). Berbagai pembatasan kegiatan akibat penyebaran Covid-19 pada tahun 2020-2022 tentunya berdampak pada berbagai sektor usaha tersebut di Kota Depok.

Secara umum, persentase penduduk miskin di Kota Depok jauh lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan

provinsi Jawa Barat dan nasional. Angka kemiskinan nasional baru mencapai *single digit* pada tahun 2018, sedangkan Kota Depok sudah mencapainya sejak pertama kali dihitung tahun 2004. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Miskin di Kota Depok, 2015 - 2023



Sumber : Susenas 2015 - 2023

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Depok relatif lebih stagnan jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan nasional yaitu di kisaran 2 persen. Kajian lebih mendalam terkait profil dan karakteristik penduduk miskin di Kota Depok serta faktor apa saja yang diduga

menjadi penyebabnya akan menjadi menarik untuk dilakukan.

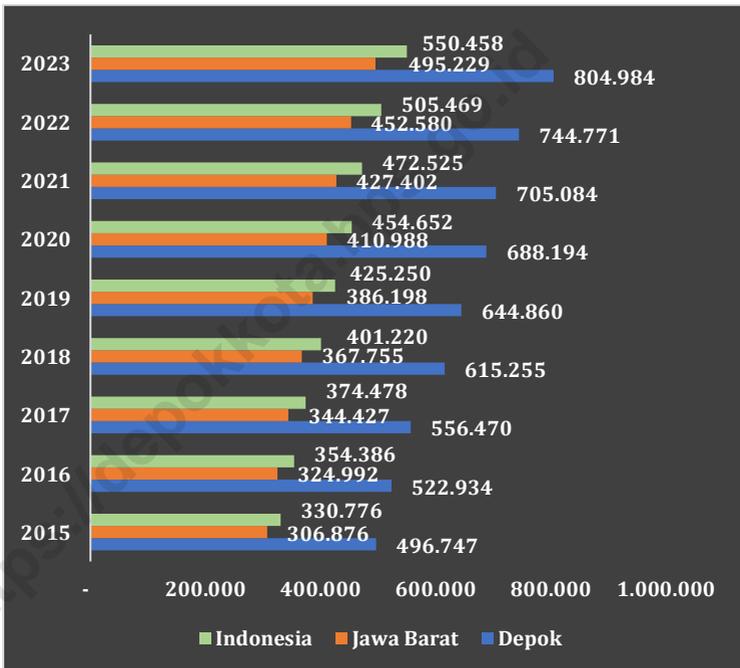
Persentase penduduk miskin di Kota Depok pada 2023 mencapai 2,38 persen atau diperkirakan sebesar 61,95 ribu orang. Dibandingkan dengan tahun 2022 (2,53 persen atau 64,36 ribu orang), persentase penduduk miskin turun 0,15 persen poin atau berkurang 2,41 ribu orang.

Penurunan persentase juga terjadi di Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada periode 2023 ke 2022, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat turun sebesar 0,44 persen poin atau diperkirakan sebanyak 182,38 ribu orang, sedangkan pada tingkat nasional terjadi penurunan sebesar 0,18 persen poin atau diperkirakan sebanyak 262,61 ribu orang penduduk miskin.

Kemiskinan secara umum dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk dikatakan miskin

apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Gambar 3.4 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Depok, 2015-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : BPS, Susenas 2015-2023

Garis Kemiskinan (GK) Kota Depok selama periode 2015 – 2023 berada di atas GK Provinsi Jawa Barat dan nasional, sementara GK Provinsi Jawa Barat berada di bawah GK nasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara

umum nilai pengeluaran atau biaya hidup minimum seseorang yang tinggal di Kota Depok jauh di atas Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Selama tahun 2015-2023, Garis Kemiskinan (GK) bertambah sejalan dengan inflasi dan kondisi ekonomi. Pada periode 2021 ke 2022, GK Kota Depok naik 5,63 persen dari Rp705.084,- per kapita per bulan menjadi Rp744.771,- per kapita per bulan. Sementara itu pada periode 2022 ke 2023, GK Kota Depok naik kembali sebesar 8,08 persen dari Rp744.771,- per kapita per bulan menjadi Rp804.984,- perkapita per bulan.

GK Provinsi Jawa Barat dan nasional juga menunjukkan pola yang sama, pada periode 2021 ke 2022 dan 2022 ke 2023. Pada periode 2021 ke 2022, GK Provinsi Jawa Barat naik 5,89 persen dari Rp427.402,- per kapita per bulan menjadi Rp452.580,- per kapita per bulan. Sementara itu pada periode 2022 ke 2023, GK Provinsi Jawa Barat naik sebesar 9,42 persen dari Rp452.580,- per kapita per bulan menjadi Rp495.229,- perkapita per bulan.

Pada periode 2021 ke 2022, GK nasional naik 6,97 persen dari Rp472.525,- per kapita per bulan menjadi Rp505.469,- per kapita per bulan. Sementara itu pada periode 2022 ke 2023, GK nasional naik sebesar 8,90

persen dari Rp505.469,- per kapita per bulan menjadi Rp550.458,- perkapita per bulan.

3.3. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota

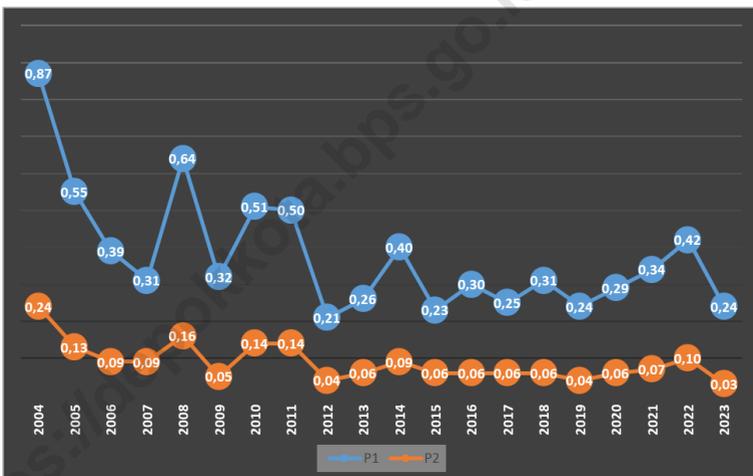
Depok

Kebijakan kemiskinan secara umum seharusnya tidak saja menurunkan angka kemiskinan, namun juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebagai dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode 2004-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kota Depok mengalami fluktuasi. P_1 turun agak tajam pada periode 2004 -2007 namun kembali naik dan turun lagi pada tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2015 kenaikan

dan penurunan P_1 mulai lebih stabil. Sementara itu untuk P_2 kenaikan dan penurunan cenderung lebih stabil dibandingkan P_1 . Perubahan P_2 cenderung lebih stagnan.

Gambar 3.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kota Depok, 2004-2023



Sumber : BPS, Susenas 2004-2023

Kondisi Pandemi Covid-19 salah satunya juga memperparah kembali angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Depok pada tahun 2020-2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Depok yang pada tahun 2019 sudah berada pada kisaran 0,24 poin mengalami kenaikan

kembali pada tahun 2020 menjadi 0,29 poin, lalu naik kembali pada tahun 2021 menjadi 0,34 poin. Kenaikan pada masa pandemi ini terus berlanjut pada tahun 2022, sebesar 0,08 poin menjadi 0,42 poin. Pada tahun 2023 diamna masa pandemi sudah berakhir, P_1 turun kembali sebesar 0,18 poin dari 0,34 menjadi 0,24 dan tentunya nilai ini akan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun mendatang.

Hal yang sama terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Depok. Pada tahun 2019 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Depok sebesar 0,04 poin, namun mengalami kenaikan pada awal pandemi Covid-19 pada 2020 menjadi 0,07 poin. P_2 terus mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 0,07 poin, dan bahkan mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin pada 2022 menjadi 0,10 poin. Pasca pandemi P_2 turun kembali sebesar 0,07 poin dari 0,10 menjadi 0,03 pada tahun 2023.

BAB IV

PROFIL KEMISKINAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK

4.1. Pendidikan

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023

Wilayah	< SD	Tamat SD/SMP	≥ SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Depok	7,66	58,89	33,45
Jawa Barat	13,49	66,67	19,83

Sumber : Susenas 2023

Pada Tabel 4.1. menunjukkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Depok di dominasi mereka yang tamatan SD/SMP yaitu sebesar 58,89 persen dan tamatan SMA ke atas sebesar 33,45 persen. Sisanya sebesar 7,66 persen penduduk miskin adalah tidak tamat SD termasuk yang tidak pernah sekolah.

Hal senada juga terjadi pada tingkat Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat usia 15 tahun ke atas didominasi oleh tamatan SD/SMP yaitu sebesar 66,67 persen dan tidak tamat SD sebesar 13,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin, baik di Kota Depok maupun di Provinsi Jawa Barat,

secara umum tidak menamatkan Pendidikan dasar 12 tahun yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

4.2. Ketenagakerjaan

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Status Bekerja, 2023

Wilayah	Tidak Bekerja	Bekerja	
		Kegiatan Informal	Kegiatan Formal
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Depok	33,61	30,60	35,78
Jawa Barat	49,01	32,06	18,93

Sumber : Susenas 2023

Menurut sektornya, pekerja dibagi menjadi dua yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja informal adalah pekerja yang mempunyai status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian serta pekerja keluarga tidak dibayar.

Pada umumnya kepala rumah tangga miskin berstatus sebagai pekerja Informal. Sumber penghasilan utama menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial

ekonomi suatu rumah tangga. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari total penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Depok tahun 2023 lebih dari sepertiga (33,61 %) berstatus tidak bekerja, sisanya 66,39 persen bekerja baik sebagai pekerja informal maupun pekerja formal.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Sektor Bekerja, 2023

Wilayah	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan Di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Depok	33,61	-	66,39
Jawa Barat	49,01	16,45	34,54

Sumber : Susenas 2023

Secara umum, rumah tangga miskin yang bekerja di Kota Depok tahun 2023 bekerja pada bukan sektor pertanian yaitu sebesar 66,39 persen (Tabel 4.3). Adapun untuk Provinsi Jawa Barat, penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian masih cukup besar (16,45 %).

4.3. Pengeluaran Perkapita

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa persentase pengeluaran per kapita untuk makanan penduduk miskin

di Kota Depok tahun 2023 mencapai 61,25 persen. Berbeda dengan penduduk tidak miskin yang persentase pengeluaran perkapita untuk makanannya hanya 40,99 persen. Persentase pengeluaran perkapita untuk makanan pada penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, mencapai 64,13 persen dan untuk penduduk tidak miskin persentase pengeluaran perkapita untuk makanan sebesar 48,26 persen.

Tabel 4.4. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan menurut Wilayah dan Status Miskin, 2023

Wilayah	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Depok	61,25	40,99	41,08
Jawa Barat	64,13	48,26	48,60

Sumber : Susenas 2023

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa persentase pengeluaran terbesar yang dimiliki oleh penduduk miskin adalah pengeluaran konsumsi makanan. Pengeluaran non makanan seperti pendidikan, sandang, papan, dan lain

sebagainya menjadi prioritas selanjutnya bagi mereka, hanya setelah pengeluaran makanan terpenuhi.

4.4. Fasilitas Perumahan

Tabel 4.5. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Wilayah yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/ Bersama, 2023

Wilayah	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)
Kota Depok	100,00	100,00
Jawa Barat	92,60	88,96

Sumber : Susenas 2023

Air layak adalah air yang bersumber dari leding, air hujan, air pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja 10 meter ke atas. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa penggunaan air layak dan jamban sendiri/ bersama di Kota Depok. Seluruh (100,00 persen) rumah tangga miskin di Kota Depok sudah menggunakan air layak.

Persentase rumah tangga miskin di Jawa Barat yang menggunakan air layak sebesar 92,60 persen, artinya masih terdapat 7,40 persen penduduk miskin di Jawa Barat yang belum mendapat akses air layak.

4.5. Program Pemerintah

Tabel 4.6. Rata-rata Jumlah Sembako yang Diterima dan Harga yang Dibayarkan dalam BPNT/Program Sembako, 2023

Jenis Sembako	Jumlah per bulan	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)
Beras (/kg)	5,19	13.893
Telur (/butir)	8,85	2.009

Sumber : Susenas 2023

Salah satu bantuan pemerintah dalam rangka memberikan keringanan konsumsi rumah tangga miskin adalah pemberian bantuan pangan non tunai (BPNT)/program sembako. Rumah Tangga Miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah rumah tangga miskin yang menerima bantuan sosial pangan BPNT. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik. Uang elektronik hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan/atau telur di pedagang bahan pangan (E-warong) yang bekerja sama dengan Bank Penyalur.

Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata jumlah sembako yang diterima dan harga yang dibayarkan dalam BPNT/Program Sembako tahun 2023. Rata-rata beras yang dibeli melalui program BPNT sebanyak 5,19 kg/bulan dengan rata-rata harga Rp13.893,- , sedangkan rata-rata telur yang dibeli sebanyak 8,85 butir/bulan dengan rata-rata harga Rp2.009,-.

4.6. Status Kemiskinan Menurut Kelompok Umur

Tabel 4.7. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kelompok Umur, 2023

Kelompok Umur	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)
Anak (0-15 tahun)	40,74
Pemuda (16-30 tahun)	24,26
Dewasa (> 30 tahun)	35,00
Total	100,00

Sumber : Susenas 2023

Tabel 4.8 menunjukkan persentase penduduk miskin menurut kelompok umur. Kategori kelompok umur yang digunakan adalah kelompok umur sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Publikasi Statistik Pemuda Indonesia

(BPS, 2022). Keduanya menyebutkan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan dan berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam hal ini, 0-15 tahun adalah umur anak-anak dan > 30 tahun adalah umur dewasa.

Pada Tabel 4.8 terlihat bahwa persentase kelompok umur penduduk miskin terbesar adalah penduduk miskin anak-anak yaitu 40,74 persen, lalu penduduk miskin dewasa sebesar 35,00 persen, dan terakhir penduduk miskin pemuda yaitu 24,26 persen. Berdasarkan data tersebut, persentase besar penduduk miskin di kelompok umur anak-anak sebaiknya perlu mendapat perhatian lebih, karena kelompok umur ini adalah kelompok umur yang masih memiliki masa depan yang panjang. Perencanaan dan kebijakan yang tepat diharapkan suatu saat nanti akan dapat menghilangkan kemiskinan yang melingkupi mereka pada saat anak-anak tersebut sudah beranjak menjadi pemuda maupun dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2023. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia 2023. BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Pemuda Indonesia 2022. BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2023. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2023. BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2023. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2023. BPS: Bandung.

Badan Pusat Statistik. 2023. Kemiskinan Kabupaten_Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2022. BPS: Bandung.

Badan Pusat Statistik. 2017. Potensi Ekonomi Kota Depok Hasil Sensus Ekonomi 2016. BPS: Depok.

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Metadata-Pilar-Sosial-Edisi-II. Kementerian PPN/Bappenas :Jakarta

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK**

Jalan Boulevard Sektor Anggrek , Grand Depok City, Kota Depok
Telp/fax : (021)-7710370/(021)-77825913
Website : depokkota.bps.go.id, Email : bps3276@bps.go.id